

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang tergabung dalam Gugus 3 Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis. Gugus sekolah tersebut merupakan kelompok satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah Kecamatan Lakhok dan memiliki karakteristik lingkungan pendidikan yang relatif sama, baik dari aspek sosial masyarakat, kondisi ekonomi orang tua siswa, maupun sistem pengelolaan pendidikan di sekolah. SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakhok menjadi lokasi penelitian karena memiliki keberadaan Komite Sekolah yang aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, namun berdasarkan pengamatan awal masih ditemukan beberapa kendala dalam optimalisasi perannya terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Secara umum, SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakhok memiliki visi untuk mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas, berkarakter, dan mampu meningkatkan prestasi peserta didik. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, sekolah didukung oleh kepala sekolah, tenaga pendidik, Komite Sekolah, serta partisipasi masyarakat dan orang tua siswa. Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran formal, sekolah juga

mengembangkan berbagai program penunjang seperti kegiatan ekstrakurikuler, pembinaan karakter, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan guna menunjang proses belajar mengajar yang lebih efektif dan kondusif.

Dari aspek kelembagaan, Komite Sekolah di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), badan pendukung (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*), dan mediator (*Mediator agency*) antara sekolah dan masyarakat. Dalam praktiknya, Komite Sekolah telah terlibat dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan program sekolah, pengadaan sarana prasarana, pengawasan kegiatan sekolah, serta penyaluran aspirasi orang tua siswa. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam aspek pengelolaan program, pengawasan, dan pengembangan kemitraan dengan pihak eksternal.

Berdasarkan kondisi tersebut, SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok dinilai relevan untuk dijadikan objek penelitian karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai optimalisasi peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan pada pendidikan dasar. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang

komprehensif mengenai pelaksanaan fungsi Komite Sekolah, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya, serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di lingkungan sekolah dasar.

4.1.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian dalam penelitian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi mengenai optimalisasi peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan pada pendidikan dasar di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Data penelitian diperoleh dari berbagai informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi Komite Sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, pengurus Komite Sekolah, dan orang tua siswa. Melalui teknik triangulasi sumber dan teknik, data yang diperoleh dianalisis untuk memperoleh gambaran yang objektif dan mendalam mengenai pelaksanaan peran Komite Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hasil penelitian ini difokuskan pada empat fungsi utama Komite Sekolah sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yaitu sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), badan pendukung (*supporting agency*), badan pengontrol (*controlling agency*), dan badan penghubung (*Mediator agency*). Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan kontribusi peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan berdasarkan dimensi mutu layanan pendidikan

yang meliputi *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa Komite Sekolah di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok telah menjalankan perannya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa kendala, baik dari aspek kelembagaan, sistem kerja, maupun keterbatasan sumber daya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan sistematis, maka hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan fungsi dan peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan sebagai berikut.

4.1.2.1 Peran Komite sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory agency*) dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Program sekolah merupakan acuan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan sekolah. Program yang terencana dengan baik akan menghasilkan mutu layanan pendidikan yang baik pula. Agar terjadi kelancaran dalam pelaksanaan program sekolah, dalam hal penyusunan program sekolah haruslah melibatkan komite sekolah.

Untuk mengetahui pemberdayaan Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok sebagai badan pertimbangan dengan fungsi perencanaan sekolah dalam mengidentifikasi sumber daya pendidikan di masyarakat diajukan

pertanyaan yang sama kepada kepala sekolah, guru dan Komite Sekolah yaitu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah di SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Selasa, 10 Maret 2026 Pukul 09.00–12.00 WIB mengungkapkan tentang peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam fungsi perencanaan adalah sebagai berikut:

“Di SD Negeri 1 Cintaratu ini, komite sekolah selalu dilibatkan dalam penyusunan program sekolah melalui rapat bersama antara guru, kepala sekolah, dan komite. Komite membantu menyampaikan aspirasi orang tua sehingga program yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. (NKS.KSSD1)

Hal ini dipertegas lagi oleh salah seorang guru di Sekolah tersebut, pada hari Selasa, 10 Maret 2026 Pukul 09.00-12.00, beliau mengemukakan bahwa:

“Sepengetahuan saya Komite Sekolah memberikan pertimbangan untuk mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat dengan menggalang dana dengan program dana sumbangan pendidikan. Saya pun merasakan dampak positif dari adanya dana tersebut karena dengan dana tersebut peserta didik mendapatkan baju olahraga yang dipakai untuk kegiatan mata pelajaran saya ajarkan yaitu mata pelajaran olahraga”. (K.GRSD 1)

Hal senada juga sama di ungkapkan mengenai peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam fungsi perencanaan yang berada di SD Negeri 4 Cintaratu, pada hari Selasa, 17 Maret 2026, Pukul 09.00-12.00 WIB, Kepala sekolah mengatakan bahwa:

“Sebagai badan pertimbangan Komite Sekolah selalu membantu kami jika kami mengalami suatu masalah, apabila sekolah kekurangan tenaga ataupun materi. Komite Sekolah selalu membantu dengan cara mencari sumber daya pendidikan yang dibutuhkan sekolah dari masyarakat sekitar sekolah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan”. (L.KSSD4).

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Komite di SD Negeri 4 Cintaratu Kecamatan Lakbok, pada hari Sabtu 11 April 2026 Pukul 1300-1400 WIB dengan mengatakan sebagai berikut:

“ya sepengetahuan saya, sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat yang dimanfaatkan untuk sekolah kami berupa dana dan manusia yang dibutuhkan oleh sekolah. Adapun cara mengidentifikasi sekolah melibatkan Komite Sekolah untuk memberikan pertimbangannya karena Komite Sekolah lebih memahami kondisi sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat”. (SP.KKSD04).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan dengan fungsi perencanaan sekolah dalam hal sumber daya pendidikan di sekolah mencakup beberapa hal, yaitu: memberikan pertimbangan dalam merencanakan besarnya dana sumbangan pendidikan, menyeleksi tenaga pendidikan yang ada di masyarakat sebelum direkrut sebagai tenaga pendidikan, dan merencanakan bantuan tenaga masyarakat untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Pemberian pertimbangan dalam hal pengadaan buku baik buku bagi siswa maupun buku untuk sekolah, ataupun dalam pengadaan alat peraga pendidikan, Komite Sekolah selalu memberikan pertimbangan. Untuk pengadaan buku yang sifatnya membebaskan orang tua siswa Komite Sekolah selalu memberikan pertimbangan terlebih dahulu misalnya dengan memberikan usulan bahwa pembayaran buku boleh melakukan penyicilan agar tidak memberikan beban kepada orang tua siswa. Untuk

pembelian buku yang dianggarkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) komite sekolah tidak ikut campur.

Pada awal tahun pelajaran sekolah mengundang komite sekolah dalam rapat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Selain komite sekolah, sekolah juga mengundang tokoh masyarakat dan orang tua siswa. Hal ini dilakukan agar komite sekolah dan orang tua siswa tahu kegiatan sekolah dan pembiayaannya. Untuk pengesahan RAPBS pun sekolah mengikutsertakan komite sekolah. Seperti yang dikatakan oleh salah ketua komite SD Negeri 1 Cintaratu, pada hari Sabtu 14 Maret 2026 Pukul 09.00 – 11.00 WIB menerangkan bahwa:

“Untuk pengesahan RAPBS pihak sekolah selalu mengikutsertakan pihak komite sekolah, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengesahan antara bendahara sekolah, kepala sekolah dan komite sekolah dalam draf RAPBS yang di bubuhi tanda tangan antar kepala sekolah, komite sekolah dan bendahara”. (SY.KKSD1).

Berdasarkan hasil observasi penulis di SD Negeri 1 Cintaratu dan SD Negeri 4 Cintaratu, ditemukan bahwa keterlibatan komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penyusunan program sekolah telah terefleksi dalam beberapa kegiatan penting seperti penyusunan RKAS, identifikasi kebutuhan sumber daya pendidikan, serta pengambilan keputusan dalam pengadaan buku dan alat peraga. Saat dilakukan observasi terhadap rapat penyusunan RKAS, terlihat bahwa komite sekolah aktif memberikan masukan, terutama terkait efisiensi penggunaan

anggaran dan usulan pengadaan sarana prioritas seperti meja belajar, papan tulis, dan kebutuhan alat praktik.

Dokumentasi yang diperoleh dari berita acara rapat menunjukkan adanya kehadiran dan tanda tangan komite sekolah dalam lembar pengesahan RKAS tahun ajaran 2025/2026. Selain itu, dokumentasi foto kegiatan rapat antara kepala sekolah, guru, dan komite sekolah menjadi bukti nyata adanya komunikasi dan konsultasi antara pihak sekolah dan komite. Hal ini memperkuat data wawancara yang menyatakan bahwa komite sekolah tidak hanya dilibatkan dalam tahap akhir pengesahan, tetapi juga pada tahap perencanaan dan pertimbangan awal.

Dengan demikian, hasil observasi dan dokumentasi mendukung temuan wawancara sebelumnya, bahwa peran komite sekolah sebagai *advisory agency* sudah mulai dijalankan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan seperti perlunya pelatihan lebih lanjut agar peran pertimbangan mereka lebih berbasis data dan kebutuhan jangka panjang sekolah.

Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam penyusunan RKAS dengan cara menganalisis rancangan RKAS yang disusun oleh pihak sekolah agar RKAS tersebut sesuai dengan visi misi sekolah dan tujuan pendidikan nasional. Adapun bentuk pertimbangan Komite Sekolah secara lebih rinci dalam penyusunan RKAS, yaitu menganalisis rancangan RKAS yang disusun oleh sekolah dan Komite Sekolah memasukan program-program berdasarkan masukan dari masyarakat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan Ketua Komite Sekolah, diketahui bahwa komite juga turut memberikan pertimbangan dalam proses perekrutan guru honorer untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar di sekolah. Terutama apabila pembiayaannya berasal dari dana komite, komite memberikan masukan agar perekrutan dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan. Komite juga menyarankan pemberian insentif kepada guru yang memberikan les tambahan di luar jam pelajaran, selama kondisi keuangan memungkinkan.

Tidak hanya itu, komite sekolah juga menampung keluhan masyarakat terkait proses pembelajaran. Misalnya, adanya masukan agar guru lebih aktif melibatkan siswa dalam pembelajaran atau mengurangi beban tugas rumah. Komite menyampaikan hal tersebut kepada pihak sekolah dalam forum rapat bersama sebagai bagian dari bentuk pertimbangan yang bersifat representatif dari masyarakat dan orang tua siswa.

Komite sekolah merupakan penghubung antara orang tua siswa dengan sekolah. Komite sekolah bertindak dengan aktif. Keluhan atau masukan dari masyarakat tentang proses belajar atau kegiatan ekstrakurikuler selalu disampaikan pihak komite kepada pihak sekolah. Selain itu komite sekolah memberikan pertimbangan tentang sarana prasarana seperti penambahan meja dan kursi bagi siswa. seperti yang di ungkapkan oleh ketua komite SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 Pukul 09.00 – 12.00 WIB bahwa:

“Komite sekolah merupakan penghubung anantara orang tua siswa dengan sekolah, jadi jika ada keluhan atau masukan dari masyarakat tentang proses belajar atau kegiatan ekstrakurikuler, komite sekolah akan selalu menyampaikan hal tersebut kepada pihak sekolah. Komite memberi pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang digunakan oleh sekolah misalnya penambahan meja dan kursi bagi siswa yang masih bisa diperbaiki, atau mengenai papan tulis yang digunakan”. (SY.KKSD1).

Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan dalam melengkapi sarana dan prasarana yang dapat memperlancar proses pembelajaran di sekolah, yaitu dengan melakukan pengontrolan secara rutin terhadap sarana dan prasarana yang ada serta mendata sarana dan prasarana yang belum ada di sekolah. Setelah melakukan pengontrolan terhadap sarana dan prasarana, Komite Sekolah memberikan pertimbangannya dengan cara mengalokasi dana sumbangan pendidikan yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat yang peduli pendidikan untuk merawat atau melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok telah berjalan, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Komite tidak hanya dilibatkan dalam penyusunan program dan anggaran sekolah, tetapi juga memberi pertimbangan dalam pengadaan sarana prasarana, rekrutmen tenaga honorer, hingga penyampaian aspirasi masyarakat terkait proses pembelajaran. Dengan meningkatnya kesadaran dan kolaborasi antara pihak sekolah dan komite, fungsi *advisory agency*

dapat terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil semakin responsif terhadap kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah.

4.1.2.3 Peran Komite Sekolah sebagai Pendukung (*Supporting agency*) dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Komite Sekolah perannya sebagai badan pendukung mempunyai tiga peran yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah, memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah, memobilisasi tenaga pendidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah di SD Negeri 4 Cintaratu pada hari Selasa, 17 Maret 2026 Pukul 09.00 – 12.00 WIB diketahui bahwa:

“dalam hal dukungan terhadap pemantauan kondisi ketenaga pendidikan komite tidak terlibat langsung, Komite Sekolah mengetahui kondisi tenaga pendidikan dari informasi yang kami berikan. Apabila sekolah kekurangan tenaga kependidikan, kami meminta bantuan pada Komite Sekolah untuk mencari tenaga kependidikan yang sekolah butuhkan serta memenuhi syarat dengan mengutamakan tenaga pendidikan yang berada di sekitar lingkungan sekolah”. (L.KSSD4).

Selain mendukung dalam pengadaan tenaga pendidikan, Komite Sekolah di Gugus 2 Kecamatan Lakbok juga berperan aktif dalam membantu sekolah melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi wali murid. Hal ini dilakukan melalui pengisian formulir biodata siswa yang

mencantumkan pekerjaan, penghasilan orang tua, dan latar belakang sosial lainnya. Data tersebut sangat berguna dalam menentukan besarnya kontribusi iuran komite agar tidak memberatkan wali murid yang kurang mampu. Pendataan ini juga membantu pihak sekolah dalam merancang program bantuan atau subsidi silang yang lebih adil dan tepat sasaran. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite Sekolah pada hari Rabu, 14 Maret 2026 Pukul 09.00 – 12.00 WIB yang menyatakan bahwa:

“Komite Sekolah tetap melakukan pendataan mengenai kondisi sosial ekonomi orang tua siswa, dengan mengisi biodata siswa dan pekerjaan serta jumlah penghasilan orang tua siswa, jadi dari biodata tersebut dapat dilihat kemampuan ekonomi orang tua siswa.” (SP.KKSD04).

Namun demikian, peran Komite Sekolah dalam menggalang sumber daya dari luar seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah di luar sektor pendidikan, masih sangat terbatas. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Komite dan guru, diketahui bahwa hingga saat ini, komite belum pernah secara aktif menjalin kemitraan eksternal di luar iuran wali murid. Hal ini menunjukkan adanya tantangan tersendiri dalam mewujudkan peran *Supporting agency* yang lebih progresif. Faktor keterbatasan kapasitas, waktu, dan pengalaman dalam menjalin jejaring sosial-ekonomi menjadi penyebab utama, hal ini diungkapkan oleh Guru Kelas SD Negeri 4 Cintaratu pada hari Selasa 07 April 2026 yang menyatakan bahwa:

“Sampai sekarang, komite belum melakukan pencarian dana secara mandiri di luar iuran orang tua. Dana yang dikelola masih murni dari sumbangan sukarela bulanan wali murid. Mereka belum menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti dunia usaha...” (DI.GRSD4 1)

Meskipun demikian, komite tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan fisik sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat beberapa bentuk dukungan konkret seperti pembuatan pagar sekolah, pengadaan tempat cuci tangan pasca pandemi, serta pengerasan jalan menuju sekolah. Dana yang digunakan berasal dari kombinasi antara dana pemerintah (DAK), iuran komite, dan sumbangan masyarakat. Meski tidak terlibat secara langsung dalam proses teknis pembangunan, komite melakukan pemantauan dan meminta laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan kegiatan fisik.

Dalam pemantauan sarana prasarana, komite sekolah secara aktif meninjau fasilitas sekolah seperti WC, ruang kelas, papan tulis, dan meja kursi. Apabila ditemukan kerusakan, laporan disampaikan dalam rapat komite atau langsung kepada kepala sekolah. Namun komite tidak ikut campur dalam hal teknis pengawasan proyek, mengingat hal tersebut merupakan wewenang pihak sekolah dan instansi teknis terkait. Komite lebih menempatkan diri sebagai mitra yang memberikan masukan, dukungan moral, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik sekolah.

Senada dengan pendapat tersebut, kepala sekolah SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Senin, 16 Maret 2026, Pukul 09.00-12.00 WIB menerangkan bahwa:

“dalam hal dukungan terhadap pemantauan kondisi tenaga pendidikan komite tidak terlibat langsung, kecuali apabila sekolah kekurangan tenaga kependidikan Komite Sekolah ikut mencari tenaga kependidikan yang memenuhi syarat serta diutamakan yang berada di sekitar lingkungan sekolah dulu”. (NKS.KSSD1).

Salah seorang guru juga mengungkapkan hal yang sama tentang peran komite sebagai badan pendukung sumberdaya tenaga pendidik, pada hari Selasa, 10 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB beliau mengemukakan bahwa:

“yang saya rasakan dukungan komite kepada kondisi kami sebagai tenaga pendidikan kurang aktif karena komite hanya memantau kondisi kami disaat kami kekurangan personil. Padahal dukungan materi terutama untuk tenaga pendidikan yang berstatus tidak tetap sangat diperlukan”. (K.GRSD 1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan Komite Sekolah sebagai badan pendukung dalam pemantauan kondisi tenaga pendidikan di sekolah tidak melakukan pemantauan secara langsung, Komite Sekolah hanya menunggu laporan kondisi tenaga pendidikan dari sekolah. Dalam menanggapi laporan sekolah Komite Sekolah memberikan pertimbangannya untuk merekrut tenaga pendidikan yang dibutuhkan sekolah.

Sebagai badan pendukung komite sekolah berperan aktif dalam penggalan sumber dana pendidikan. Komite sekolah sangat tanggap untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan seperti pemagaran sekolah. Sumber dana yang dikelola komite sekolah berasal hanya dari orang tua siswa. agar tidak memberatkan orang tua siswa, komite sekolah melakukan pendataan sendiri mengenai kondisi sosial

ekonomi orang tua siswa. Seperti yang diungkapkan oleh ketua komite SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Sabtu 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB, menerangkan bahwa:

“Komite Sekolah tetap melakukan pendataan mengenai kondisi sosial ekonomi orang tua siswa, dengan mengisi biodata siswa dan pekerjaan serta jumlah penghasilan orang tua siswa, jadi dari biodata tersebut dapat dilihat kemampuan ekonomi orang tua siswa”. (SY.KKSD1).

Selanjutnya wawancara dengan kepala sekolah tentang anggaran pendidikan, kepala sekolah pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengungkapkan bahwa:

“saya selaku kepala sekolah melibatkan Komite Sekolah dalam penyusunan RKAS untuk memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah. Komite Sekolah juga memberikan dukungan anggaran dengan Dana Sumbangan Pendidikan yang berasal dari orang tua peserta didik. Dana Sumbangan Pendidikan biasanya di alokasikan untuk pembiayaan seperti pembelian baju batik peserta didik, baju olahraga, pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan perpindahan kelas sembilan dan kenaikan kelas tujuh dengan delapan”. (NKS.KSSD1).

Ketua komite juga mengungkapkan hal yang serupa tentang peran komite sebagai badan pendukung anggaran, mengatakan bahwa:

“dukungan Komite Sekolah terhadap anggaran sekolah yaitu dengan cara menganalisis RKAS dan penggalangan dana sumbangan pendidikan supaya anggaran sekolah digunakan secara efektif dan efisien”. (KT2, Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB)

Komite Sekolah sebagai badan pendukung dalam memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah, yaitu memberikan dukungan dengan cara mengikuti penyusunan RKAS agar mengetahui kondisi

anggaran pendidikan di sekolah. Anggaran pendidikan di sekolah bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tetapi tidak semua anggaran pendidikan dapat terpenuhi dari BOS, sehingga Komite Sekolah berinisiatif mencari dana tambahan untuk anggaran pendidikan dengan mengadakan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP). DSP merupakan dana sumbangan pendidikan yang berasal dari orang tua peserta didik dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

Komite sekolah melibatkan tokoh masyarakat atau pemerintah di luar anggota komite untuk melakukan pendataan keadaan sosial ekonomi masyarakat khususnya orang tua siswa. Pendataan seperti ini sangat berguna dalam hal penggalan sumber dana dari masyarakat. Selama kepengurusan komite sekolah pernah melakukan rehab atau perbaikan pemagaran dan WC siswa. Dalam kegiatan tersebut komite sekolah ikut mengawasi proses rehab, tetapi untuk rehab atau perbaikan dari sumberdana yang lain komite hanya memantau saja. Seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang informan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB), bahwa:

“Kalau ikut mengawasi proses rehabilitasi/perbaikan, pihak komite sekolah tidak ikut, namun karena pengawas proyek sudah ada dari instansi yang berwenang, jadi pihak komite sekolah hanya memantau pelaksanaan rehabilitasi saja, namun kalau ada yang menyimpang dari bestek pihak”. (BDK.GRSD4 2)

Selanjutnya komite sekolah pada hari Rabu, 11 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB) mengungkapkan bahwa:

“sebagai badan pendukung Komite Sekolah dalam memantau kondisi sarana dan prasarana di sekolah, Komite Sekolah sering

datang ke sekolah sehingga dapat melihat langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Apabila terdapat kerusakan, Komite Sekolah melaporkan ke kami (pihak sekolah) serta memusyawarakannya untuk memperbaiki kerusakan tersebut”. (SP.KKSD04).

Sejalan dengan pernyataan tersebut, kepala sekolah SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Selasa, 17 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB) mengungkapkan bahwa:

“dalam memantau sarana dan prasarana Komite Sekolah selalu koordinasi dengan saya, mereka sudah memiliki jadwal tersendiri untuk memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah. Jika pada saat pengontrolan ditemukan kekurangan atau kerusakan sarana dan prasarana komite mengajak pihak sekolah berunding untuk mencari solusinya”. (NKS.KSSD1).

Selain pemantauan pada proses perbaikan sarana dan prasana sekolah, komite juga selalu memantau kondisi sarana dan prasarna yang lain seperti kondisi ruang kelas, kamar mandi, ruang praktikum, serta keadaan meja dan kursi apa ada yang rusak. Tidak hanya sarana dan prasanara yang dipantau oleh komite sekolah, kondisi ketenagaan pendidikan pantau oleh komite sekolah. Hal ini si ungkapkan oleh Komite SD Negeri 4 Cintaratu Kecamatan Lakbok, pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB menerangkan bahwa:

“Dalam hal ketenagaan pendidikan komite sekolah terus meantau kondisinya, apakah ada perlu penambahan yang dibutuhkan oleh sekolah, misalnya ada guru yang pindah atau pension, dalam hal ini komite sekolah bersama kepala sekolah tetap berkoordinasi apakah perlu diadakan penambahan. Dan kalau guru honorer apa komite sekolah masih mampu untuk menggajinya”. (SP.KKSD04)

Selain memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah, Komite Sekolah juga aktif dalam memberikan saran perbaikan terhadap fasilitas pendidikan. Komite secara rutin melakukan peninjauan terhadap kondisi

ruang kelas, meja-kursi siswa, kamar mandi, papan tulis, serta fasilitas pendukung lainnya. Pemantauan ini biasanya dilakukan berdasarkan laporan dari guru, siswa, atau saat adanya rapat evaluasi bersama kepala sekolah. Jika ditemukan fasilitas yang rusak atau tidak layak pakai, komite akan menyampaikan temuannya kepada pihak sekolah dalam bentuk rekomendasi atau usulan program perbaikan. Peran ini sangat membantu pihak sekolah dalam mengidentifikasi prioritas kebutuhan fasilitas yang harus segera ditangani agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Dalam beberapa kasus, Komite Sekolah juga ikut membantu menghimpun dana secara internal untuk menutupi kekurangan anggaran perbaikan, terutama bila tidak tercover dalam dana BOS. Sebagai contoh, komite pernah mengusulkan penambahan papan tulis dan perbaikan kursi rusak yang pembiayaannya diambil dari iuran wali murid. Langkah ini memperlihatkan bahwa fungsi Komite Sekolah tidak hanya sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai pelaksana dukungan konkret terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan yang lebih berkualitas dan layak.

Meskipun memiliki semangat partisipatif yang tinggi, Komite Sekolah tetap memiliki keterbatasan dalam melaksanakan fungsi teknis pengawasan proyek fisik. Hal ini dikarenakan komite merupakan lembaga non-teknis yang tidak memiliki kompetensi di bidang konstruksi atau audit teknis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan rehabilitasi fisik seperti pembangunan pagar sekolah, pengerasan jalan, atau pengadaan tempat cuci tangan, Komite Sekolah lebih menempatkan diri sebagai pemantau

kegiatan daripada pelaksana teknis. Komite biasanya memantau sejauh mana program berjalan sesuai rencana dan mengajukan pertanyaan atau saran bila ditemukan kejanggalan, namun tidak sampai ikut mengawasi teknis pelaksanaan proyek, karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak sekolah dan dinas terkait. Walaupun demikian, Komite tetap meminta laporan pertanggungjawaban dari pihak sekolah, terutama jika sumber dana berasal dari kontribusi wali murid. Mereka juga ikut menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana komite, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik. Sikap ini mencerminkan posisi Komite Sekolah sebagai lembaga penyeimbang yang menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran dan proyek sekolah agar tetap berjalan sesuai asas keadilan, efisiensi, dan tanggung jawab.

4.1.2.4 Peran Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*controlling agency*) dalam meningkatkan Mutu Pendidikan

Komite Sekolah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga peran, pertama berperan sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, dengan mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kualitas kebijakan/kualitas program dan proses perencanaan pendidikan di sekolah.

Sedangkan menurut salah seorang Informan, Ketua Komite Sekolah tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh informan lainnya pada hari Rabu, 19 Maret 2025 Pukul 09.00 WIB sebagaimana pernyataannya di bawah ini :

“Komite sekolah tetap melaksanakan fungsinya sebagai pengontrol, seperti perencanaan sekolah harus diketahui komite setiap saat, memantu proses belajar siswa apa perlu diadakan pelajaran tambahan, memantu keadaan siswa yang patut dibantu. Komite juga memantau kegiatan ekstrakurir siswa, seperti pramuka, kesenian, dan kegamaan”. (K.GRSD 1).

Senada dengan hal tersebut, kepala sekolah SD Negeri 4 Cintaratu Kecamatan Lakbok pada hari Selasa, 17 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan pendidikan dan pengawasan terhadap kualitas program sekolah, pihak komite sekolah terus melaksanakan pengawasan sehingga perencanaan pendidikan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hasil rapat komite dengan pihak sekolah”. (L.KSSD4).

Pengontrolan yang dilakukan oleh komite sekolah seperti memberikan saran tentang proses belajar mengajar di kelas misalnya menyarankan agar guru lebih melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran di kelas atau menyarankan untuk memperbanyak tugas di rumah. Seperti yang diungkapkan oleh ketua komite SD Negeri 1 Cintaratu, pada hari Sabtu 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB bahwa:

“Setelah kita melihat hasil belajar yang diperoleh siswa menurun, komite sekolah menyarankan kepada kepala sekolah untuk menambah jam pelajaran di luar jam pelajaran seperti mengadakan les tambahan, maupun menambah tugas siswa di rumah”. (SY.KKSD1).

Peran kedua memantau pelaksanaan program sekolah, dengan organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah memantau sumber daya pelaksana program dan memantau partisipasi *stake holder* pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengungkapkan peran komite dalam memanatu pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

“saya tidak melibatkan Komite Sekolah secara langsung terhadap pelaksanaan program sekolah, oleh karena itu kami selaku pihak sekolah hanya menyampaikan programprogram sekolah yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan secara lisan maupun ketika rapat dengan Komite Sekolah ataupun ketika Komite Sekolah datang ke sekolah”. (NKS.KSSD1).

Salah seorang guru pada hari Selasa, 10 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB juga mengungkapka hal yang sama mengenai peran komite dalam memantau pelaksanaan program sekolah, adalah sebagai berikut:

“di sekolah ini Komite Sekolah yang saya rasakan tidak ikut secara langsung mengawasi pelaksanaan program sekolah, walaupun begitu program sekolah berjalan lancar dan Komite Sekolah tidak mempermasalahkan hasil kerja program sekolah tersebut”. (DI.GRSD4 1).

Komite Sekolah dalam pengawasan terhadap sumber daya pelaksanaan program sekolah, hanya berbentuk saran kepada kepala sekolah, sedangkan dalam pengawasan terhadap proses belajar mengajar komite sekolah tidak pernah. Kemudian dalam memberikan saran tentang proses belajar mengajar seperti menyarankan guru lebih melibatkan sisiwa secara aktif dalam pelajaran di kelas atau menyarankan untuk memperbanyak tugas di rumah, Komite Sekolah juga tidak pernah karena menurut beliau itu sudah terlalu maju dan bukan wewenang komite.

Peran yang ketiga adalah memantau *out put* pendidikan, badan pengontrol memantau hasil ujian akhir, memantau angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang sekolah, memantau angka bertahan

sekolah. Dalam hal perencanaan, mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kebijakan di sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan, pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

Komite pernah memantau hasil ujian akhir siswa serta angka prestasi sekolah, seperti yang di ungkapkan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Cintaratu, pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB menerangkan bahwa:

“Setiap semester komite sekolah tetap memantau hasil ujian akhir siswa dengan meminta copi hasil ujian siswa kepada pembantu kepala sekolah yang membidangnya sehingga pihak komite mengetahui prestasi siswa, bahkan komite sekolah mendata jumlah siswa yang melanjutkan studi di jenjang selanjutnya. Kemudian komite sekolah juga memantau angka partisipasi sekolah”. (NKS.KSSD1).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 4 Cintaratu Kecamatan Lakbok pada hari Selasa, 17 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengungkapkan bahwa:

“kami selaku pihak sekolah melaporkan hasil ujian baik itu ujian nasional atau ujian kenaikan kelas kepada Komite Sekolah dan orang tua peserta didik pada saat acara perpisahan kelas sembilan dengan kenaikan kelas tujuh dan delapan. Jika ada dari hasil ujian tersebut yang kurang baik biasanya komite menanyakan penyebabnya serta memberikan masukan untuk perbaikan pada tahun berikutnya”. (L.KSSD4).

Menambahkan pernyataan kepala sekolah SD Negeri 4 Cintaratu, pada hari Selasa, 17 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB salah seorang guru mengatakan bahwa:

“kontrol yang dilakukan Komite Sekolah pada hasil Ujian, hanya sebatas menerima laporan dari pihak sekolah. Adapun nanti apabila

ada penurunan hasil ujian, Komite Sekolah suka bertanya kepada sekolah apa penyebab penurunan hasil tersebut, serta mencari solusi”. (BDK.GRSD4 2).

Komite Sekolah sebagai badan pengontrol terhadap terhadap *output* pendidikan yaitu hasil ujian di sekolah dengan cara menerima laporan hasil ujian dari sekolah pada akhir tahun pelajaran, tepatnya pada acara kenaikan kelas dan perpisahan. Apabila terjadi penurunan hasil ujian, Komite Sekolah mengajak bermusyawarah pada pihak sekolah untuk mencari penyebab penurunan hasil ujian serta mencari jalan keluarnya agar tidak terjadi lagi penurunan hasil ujian di sekolah.

Selain berperan dalam evaluasi proses pembelajaran dan pelaporan keuangan, Komite Sekolah juga turut serta dalam memantau angka partisipasi siswa, termasuk keberlanjutan pendidikan ke jenjang berikutnya, angka siswa pindah sekolah, serta kasus putus sekolah. Meskipun tidak memiliki kewenangan administratif secara langsung, komite memposisikan diri sebagai lembaga yang berkontribusi dalam deteksi dini dan advokasi terhadap masalah tersebut. Informasi diperoleh melalui koordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, serta dari laporan wali murid. Ketika ditemukan siswa yang berpotensi berhenti sekolah karena alasan ekonomi, keluarga, atau masalah psikososial, komite tidak tinggal diam. Mereka akan mencari solusi alternatif, seperti merekomendasikan pemberian keringanan iuran, menghubungkan dengan pihak desa untuk memperoleh bantuan sosial, atau menyarankan pendekatan personal oleh guru. Dalam beberapa kasus, komite juga

mengajak tokoh masyarakat untuk turut serta memberikan dukungan moral atau materiil kepada keluarga siswa. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa peran pengawasan komite tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kemanusiaan dalam pendidikan.

Pernyataan ini diperkuat oleh Supriyadi, Ketua Komite SD Negeri 1 Cintaratu, pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB yang menyatakan:

“Kalau ada siswa pindah atau berhenti, sekolah akan lapor ke komite dan mereka ikut mencari solusi jika bisa dibantu.” (SY.KKSD1)

Dengan adanya kepedulian dan keterlibatan aktif tersebut, peran komite sebagai badan pengontrol bukan hanya menjamin efisiensi administratif sekolah, tetapi juga memastikan keberlangsungan pendidikan bagi setiap peserta didik secara inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, salah satu bentuk pengawasan non-akademik yang dilakukan oleh Komite Sekolah adalah pemantauan terhadap partisipasi stakeholder dalam kegiatan sekolah. Stakeholder pendidikan di sini mencakup orang tua siswa, tokoh masyarakat, organisasi desa, serta unsur pemerintah lokal yang memiliki keterkaitan dengan dunia pendidikan. Komite secara berkala mencatat dan mengevaluasi tingkat kehadiran dan keterlibatan orang tua dalam kegiatan seperti rapat orang tua murid, pelaksanaan gotong royong, peringatan hari besar nasional dan keagamaan, lomba-lomba, serta kerja bakti pemeliharaan lingkungan sekolah. Tingkat partisipasi ini menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan program sekolah, khususnya yang berbasis masyarakat.

Apabila ditemukan adanya penurunan minat atau keterlibatan masyarakat, komite melakukan berbagai strategi pendekatan, seperti kunjungan rumah ke wali murid, memanfaatkan grup *WhatsApp* kelas untuk menyebarkan ajakan partisipasi, dan mengadakan forum silaturahmi informal agar hubungan antara sekolah dan masyarakat tetap harmonis. Komite juga sering menjadi penghubung langsung jika masyarakat ingin menyampaikan saran atau kritik terkait kegiatan sekolah.

Seorang guru SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Selasa, 10 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa:

“Komite sekolah melihat sejauh mana peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung kegiatan sekolah seperti lomba, peringatan hari besar, atau gotong royong.” (K.GRSD 1).

Fakta ini menegaskan bahwa peran Komite Sekolah sebagai *controlling agency* tidak hanya terfokus pada indikator akademik dan administrasi, tetapi juga mencakup pengawasan sosial atas dinamika hubungan antara sekolah dan komunitas. Penguatan fungsi ini sangat penting dalam menciptakan budaya sekolah yang partisipatif, demokratis, dan terbuka terhadap masukan masyarakat.

Menurut Ihsan (2023) peranan masyarakat terhadap sekolah antara lain terutama dalam Pengawasan, masyarakat terlibat juga dalam pengawasan terhadap sekolah (*sosial control*). Pengawasan ini terhadap segala gerak-gerik sekolah selaku lembaga pendidikan, pengawasan dapat secara langsung atau lewat Komite Sekolah atau lewat media massa.

Dengan demikian kegiatan pengawasan merupakan kontrol terhadap kerja organisasi, baik menyangkut tugas perorangan maupun institusi.

Dari hasil penelitian di lapangan penulis dapat melihat bahwa Komite Sekolah selaku badan pengontrol telah melaksanakan peran dan fungsinya, namun belum menunjukkan adanya keseragaman, hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi tentang peran dan fungsinya dimana pihak Komite Sekolah masih ada yang beranggapan bahwa tugas dan wewenangnya hanya membantu kelancaran pendidikan saja, dan tidak mencampuri urusan teknis pengajaran yang termasuk wewenang kepala sekolah, guru dan instansi pembina pendidikan, artinya peran dan fungsi Komite masih disamakannya dengan tugas wewenang BP3.

Menurut Informan sebagaimana pernyataannya pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB di bawah ini :

“Komite sekolah tetap melaksanakan fungsinya sebagai pengontrol, seperti perencanaan sekolah harus diketahui komite setiap saat, memantau proses belajar siswa apa perlu diadakan pelajaran tambahan, memantau keadaan siswa kurang mampu yang patut dibantu. Komite juga memantau kegiatan ekstrakurikuler siswa, seperti kegiatan osis, pramuka dan palang merah remaja serta kegiatan olah raga”. (NKS.KSSD1)

Sedangkan penuturan dari Informan yang merupakan Ketua Komite SD Negeri 4 Cintaratu pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa:

“Komite Sekolah selaku badan pengontrol tetap melaksanakan pengawasan seperti mengontrol kualitas kebijakan di sekolah, memantau organisasi sekolah, memantau alokasi anggaran meskipun pelaksanaannya tidak secara rutin, namun komite sekolah tetap melaksanakannya”. (SP.KKSD04).

Sedangkan pada SD Negeri 1 Cintaratu Kecamatan Lakbok, seperti yang diutarakan Ketua Komite Sekolah pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB menyebutkan bahwa:

“Komite Sekolah tetap melaksanakan perannya dalam hal pengawasan, tentang keadaan sarana dan prasarana sekolah seperti bantuan buku, komputer, bantuan maupun rehabilitasi gedung, pembuatan KTSP dengan memanggil semua guru bidang studi, dan kondisi bertahan siswa”. (SY.KKSD1).

Dalam pengontrolan terhadap keuangan sekolah, di SD Negeri 1 Cintaratu komite sekolah hanya memeriksa penggunaan dana sekolah yang berasal dari komite atau orang tua siswa. seperti yang dikatakan oleh kepala SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB bahwa:

“Dalam hal pemeriksaan laporan keuangan maupun pertanggung jawaban penggunaan dana oleh pihak sekolah, komite sekolah tidak pernah melaksanakannya, kecuali penggunaan dana komite sekolah. masalah penggunaan dana kegiatan sekolah pihak komite sekolah hanya mengawasi penggunaan dana yang berasal dari uang komite, dan komite sekolah menandatangani SPJ yang berasal dari dana komite sekolah.” (NKS.KSSD1).

Komite juga mengontrol kegiatan ekstrakurikuler siswa seperti kegiatan pramuka, palang merah remaja, drum band, dan paskibra sekolah, bahkan ketua komite selalu ikut secara langsung dalam kegiatan raimuna maupun jambore nasional dengan biaya sendiri.

4.1.2.5 Peran Komite Sekolah sebagai Penghubung (*Mediator agency*)

dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Komite Sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga peran yaitu sebagai penghubung dalam Perencanaan, yaitu menjadi penghubung

antara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan, kemudian mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah. Dalam hal penghubung dalam perencanaan sekolah, dari pengamatan di lapangan menunjukkan komite sekolah telah melaksanakan perannya artinya setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat itu adalah aspirasi atau keinginan yang muncul dari masyarakat. kemudian komite sekolah apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut disampaikan kepada sekolah untuk ditindaklanjuti dan seterusnya akan dilaksanakan, begitu juga dengan dewan pendidikan, komite sekolah terus melaksanakan hubungan yang baik meskipun sampai saat ini banyak yang diperbuat oleh Dewan Pendidikan untuk pemberdayaan Komite Sekolah di Kecamatan Lakbok.

Komite menjadi badan penghubung antara komite dengan dewan sekolah, dengan masyarakat dan dengan dewan pendidikan dalam hal perencanaan pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh ketua komite SD Negeri 4 Cintaratu Kecamatan Lakbok pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB bahwa:

“Komite Sekolah tetap menjalankan perannya sebagai mediator, dimana semua hasil rapat komite maupun keluhan dari orang tua siswa disampaikan kepada kepala sekolah. Dan hasil keputusan yang dihasilkan oleh pihak sekolah, selanjutnya disampaikan kepada orang tua siswa melalui surat yang disampaikan kepada siswa. Sedangkan keputusan yang dihasilkan komite dan pihak sekolah juga disampaikan kepada dinas pendidikan” (SP.KKSD04)

Hal yang sama diungkapkan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Cintaratu, pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa:

“kami pihak sekolah bekerja sama dengan Komite Sekolah dalam mengidentifikasi aspirasi masyarakat. Adapun peran Komite Sekolah yaitu menampung aspirasi masyarakat. Kemudian pada saat rapat awal tahun untuk menyusun RKAS, komite melaporkan aspirasi masyarakat kepada sekolah, selanjutnya aspirasi masyarakat yang kami anggap baik dimasukkan dalam RKAS”. (NKS.KSSD1)

Selanjutnya, salah satu guru di SD Negeri 4 Cintaratu pada hari Selasa, 10 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengatakan tentang peran komite sebagai penghubung dalam perencanaan mengatakan bahwa:

“aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan yang masuk ke Komite Sekolah di tampung terlebih dahulu, biasanya Komite Sekolah memilih aspirasi masyarakat tersebut untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan yang terdapat dalam RKAS”. (DI.GRSD4 1)

Komite sekolah menjalin hubungan baik dengan masyarakat khususnya orang tua siswa, dimana setiap ada hal-hal penting yang ingin dilaksanakan di sekolah, komite tetap mengundang orang tua siswa untuk mengadakan pertemuan dan selanjutnya hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada pihak sekolah maupun Dewan Pendidikan. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Senin, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa:

“Setiap aspirasi masyarakat yang muncul baik melalui saran maupun secara langsung disampaikan dalam rapat, tetap kita tampung dan dibawa ke dalam rapat pengurus. Jadi setiap keluhan masyarakat maupun orang tua siswa tetap kita sampaikan kepada pihak sekolah, sehingga kepala sekolah juga mengetahui apa yang diinginkan orang tua siswa ataupun masyarakat untuk kemajuan sekolah”. (NKS.KSSD1)

Salah seorang guru SD Negeri 1 Cintaratu juga mengatakan hal yang sama mengenai penyaluran aspirasi dari masyarakat, pada hari Selasa, 10 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB beliau mengatakan bahwa:

“sekolah ini merupakan sekolah yang berada di daerah pelosok, tetapi masyarakatnya cukup peduli dengan pendidikan. Untuk itu, sekolah berkomitmen dengan komite apabila ada aspirasi dari masyarakat untuk di tampung di komite dan nanti pada penyusunan RKAS sekolah memasukan aspirasai tersebut dalam rencana sekolah”. (DA.GRSD1 2).

Selain sebagai penampung aspirasi orang tua siswa, komite sekolah juga melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat. Sperti yang dikatakan oleh ketua komite, pada hari Sabtu 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB bahwa:

“Setiap kebijakan yang diambil sekolah adalah merupakan program dari komite sekolah, dan kebijakan tersebut kita sampaikan kepada orang tua siswa baik melalui surat maupun mengundang orang tua siswa ke sekolah, sehingga setiap kebijakan yang diambil diketahui oleh masyarakat” (SY.KKSD1)

Dalam melaksanakan perannya sebagai mediator antara sekolah dan masyarakat, Komite Sekolah tidak hanya menjalankan fungsi secara administratif atau formal, tetapi juga melalui pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini adalah kegiatan identifikasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara aktif melalui forum-forum nonformal. Hal ini dilakukan karena tidak semua orang tua siswa merasa nyaman menyampaikan pendapat secara terbuka dalam rapat resmi sekolah. Oleh karena itu, komite menjembatani dengan menciptakan ruang komunikasi yang lebih inklusif dan santai,

seperti silaturahmi informal, diskusi lingkungan, kunjungan rumah, dan penggunaan grup WhatsApp wali murid.

Media komunikasi digital seperti grup WhatsApp dinilai sangat efektif karena memungkinkan informasi tersampaikan secara cepat dan terbuka. Dari percakapan sehari-hari di grup tersebut, komite sering kali memperoleh informasi penting seperti keluhan terkait beban tugas siswa, kebutuhan fasilitas, atau harapan terhadap guru. Komite kemudian merangkum aspirasi-aspirasi tersebut dan membawanya ke dalam forum formal seperti rapat sekolah untuk didiskusikan lebih lanjut bersama kepala sekolah dan guru. Cara ini tidak hanya memperkuat hubungan emosional antara sekolah dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap sekolah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan guru SD Negeri 1 Cintaratu pada hari Selasa, 10 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB yang mengatakan:

“Mereka sering mengumpulkan masukan dari orang tua melalui pertemuan informal atau grup WhatsApp wali murid, lalu dibawa ke rapat resmi dengan sekolah.” (K.GRSD 1).

Dengan demikian, peran komite tidak hanya sebatas menyampaikan informasi satu arah, tetapi menjadi jembatan aspirasi yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat sekitar sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan Komite Sekolah sebagai badan mediator terhadap perencanaan pendidikan dari aspirasi masyarakat di

sekolah dengan cara menampung aspirasi dari orang tua peserta didik atau masyarakat mengenai perencanaan pendidikan. Aspirasi tersebut oleh Komite Sekolah di musyawarahkan bersama pihak sekolah untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan yang terdapat dalam RKAS.

Sedangkan sebagai peran kedua adalah pelaksanaan program, dengan mensosialisasikan kebijakan program sekolah kepada masyarakat, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah serta mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat (orang tua siswa) kepada sekolah. Hal ini di perkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah, pada hari Selasa, 17 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa:

“Kami sebagai pihak sekolah bekerja sama dengan komite untuk mensosialisasikan program-program pendidikan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat terutama orang tua peserta didik pada saat musyawarah penyusunan RKAS yang berlangsung di awal tahun pelajaran”. (NKS.KSSD1)

Dalam pelaksanaan program, apa yang dihasilkan dalam musyawarah setelah disetujui pihak sekolah, komite sekolah kembali menyampaikan kepada orang tua siswa melalui surat kepada anak didik. Dan semua keluhan yang disampaikan orang tua siswa tetap ditampung komite sekolah yang selanjutnya akan disampaikan kepada kepala sekolah ataupun guru. Seperti penuturan dari Ketua Komite SD Negeri 4 Cintaratu Kecamatan Lakbok pada hari Sabtu, 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB, bahwa:

“bentuk keluhan yang sering disampaikan orang tua siswa adalah masalah pengadaan buku yang terlalu memberatkan orang tua, disini

komite sekolah menyampaikan pengaduan ataupun keluhan-keluhan masyarakat (orang tua siswa) tadi kepada kepala sekolah, dimana yang memberatkan orang tua siswa tadi adalah pembayarannya terlalu singkat misalnya guru memberikan tengat waktu cuma tiga kali bayar, pihak Komite Sekolah memohon kepada kepala sekolah untuk diberikan kelonggaran pembayaran buku tersebut dari tiga kali menjadi enam kali atau satu semester dan kepala sekolah dapat menerima keluhan masyarakat tadi”. (SP.KKSD04)

Selanjutnya menurut penuturan dari salah seorang guru SD Negeri 4 Cintaratu pada hari Rabu, 19 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa:

“sepengetahuan saya bersama sekolah, komite mensosialisasikan program pendidikan kepada masyarakat terutama wali murid pada saat musyawarah penyusunan RKAS”. (DI.GRSD4 1)

Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala sekolah SD Negeri 4 Cintaratu pada hari Selasa, 17 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengatakan bahwa:

“kami selaku pihak sekolah telah menugaskan pada komite untuk menampung berbagai pengaduan dari masyarakat tentang proses pendidikan di sekolah kami. Selama ini komite menjalankan tugas ini dengan baik, karena sudah ada beberapa pengaduan dari masyarakat yang komite tampung dan disampaikan pada kami untuk kami”. (L.KSSD4)

Lebih lanjut, peran Komite Sekolah sebagai mediator tidak hanya berhenti pada proses menyampaikan atau menyalurkan aspirasi, tetapi juga telah berkembang menjadi agen pengusul kebijakan dan program pembangunan sekolah. Dalam wawancara dengan Ketua Komite SD Negeri 1 Cintaratu, terungkap bahwa komite secara aktif mengusulkan beberapa program pembangunan fisik sekolah berdasarkan observasi dan masukan dari wali murid maupun guru. Salah satu contoh konkret adalah

usulan pembangunan WC sekolah dan perbaikan ruang kelas yang bocor. Usulan tersebut muncul dari kekhawatiran wali murid terhadap kenyamanan dan kesehatan siswa, serta keprihatinan guru terhadap kondisi ruang belajar yang tidak memadai. Setelah dikomunikasikan kepada kepala sekolah melalui rapat komite, pihak sekolah menerima dan menindaklanjuti usulan tersebut dengan menyusun rencana anggaran dan menggalang partisipasi masyarakat serta mengakses dana dari sumber terkait seperti DAK dan iuran komite.

Proses ini menunjukkan bahwa komite telah menjalankan fungsi mediasi secara proaktif dan strategis. Mereka tidak hanya menunggu aspirasi datang, tetapi aktif mengidentifikasi kebutuhan dan langsung menginisiasi penyelesaiannya. Keterlibatan ini sangat penting dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang partisipatif dan transparan. Dengan memberikan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada, komite membantu sekolah menyusun program yang lebih kontekstual dan berbasis pada kebutuhan riil peserta didik dan masyarakat.

Supriyadi, Ketua Komite SD Negeri 1 Cintaratu, pada hari Sabtu 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB menyatakan bahwa:

“Komite pernah mengusulkan program pembangunan WC dan perbaikan ruang kelas yang bocor, dan usulan tersebut diterima oleh sekolah.” (SY.KKSD1)

Dengan adanya keterlibatan seperti ini, peran komite sebagai mediator berkembang tidak hanya sebagai penghubung komunikasi, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan dan pembaruan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan Komite Sekolah sebagai badan mediator terhadap pelaksanaan program dalam mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan kepada masyarakat di sekolah dengan cara bekerjasama dengan pihak sekolah mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan pada masyarakat terutama orang tua peserta didik. Komite Sekolah sebagai badan mediator terhadap pelaksanaan program dalam menampung pengaduan atau keluhan dari masyarakat di sekolah dengan cara menampung terlebih dahulu pengaduan dan keluhan dari masyarakat sebelum disampaikan kepada sekolah. Pengaduan dan keluhan dari masyarakat disampaikan ketika ada pertemuan antara Komite Sekolah dan pihak sekolah.

Peran yang ketiga sebagai penghubung adalah pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah dan sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah dan mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD 1 Cintaratu pada hari Sabtu, 16 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB mengungkapkan sebagai berikut:

“bantuan masyarakat sangat sekolah butuhkan, Komite Sekolah sebagai badan mediator membantu kami dalam memobilisasi bantuan masyarakat dengan cara mengajak masyarakat terutama orang tua peserta didik untuk melakukan kerja bakti memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan mengumpulkan dana untuk membantu proses pendidikan di sekolah”. (NKS.KSSD1)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua komite sekolah pada hari Sabtu 14 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB adalah sebagai berikut:

“Di sekolah ini, komite sebagai badan mediator memobilisasi bantuan masyarakat yang berbentuk materi maupun tenaga untuk membantu kelancaran proses pendidikan. Bantuan yang diberikan masyarakat diantaranya dana sumbangan pendidikan yang dikelola oleh komite”. (SY.KKSD1)

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah seorang guru di SD Negeri 4 Cintaratu Kecamatan Lakbok pada hari Rabu, 19 Maret 2026 Pukul 09.00 WIB adalah sebagai berikut:

“saya sebagai tenaga pendidik di sekolah ini sering berdiskusi dengan komite untuk memberdayakan masyarakat terutama wali murid dalam perbaikan gedung sekolah yang rusak, dengan adanya bantuan dari masyarakat biaya perbaikan gedung dapat ditekan sehingga dapat dialihkan pada alokasi yang lainnya”. (BDK.GRSD4 2).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat dikemukakan bahwa pemberdayaan Komite Sekolah sebagai badan mediator terhadap sumber daya dalam memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan sekolah dengan cara komite berkonsultasi terlebih dahulu dengan sekolah untuk mendata kebutuhan sekolah yang dapat dibantu oleh masyarakat. Dengan mengetahui kebutuhan sekolah, Komite Sekolah lebih mudah memobilisasi masyarakat untuk memberikan bantuan ke sekolah. Bentuk bantuan yang sudah diberikan masyarakat kepada sekolah, yaitu Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan tenaga masyarakat ketika sekolah mengadakan renovasi gedung sekolah. Dengan bantuan masyarakat tersebut proses pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. Tetapi dalam hal penghubung dalam pengelolaan sumber daya

pendidikan, pihak Komite Sekolah masih kurang berperan, belum sampai kepada penggalangan dana dari masyarakat seperti dunia usaha dan dunia industri ataupun masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

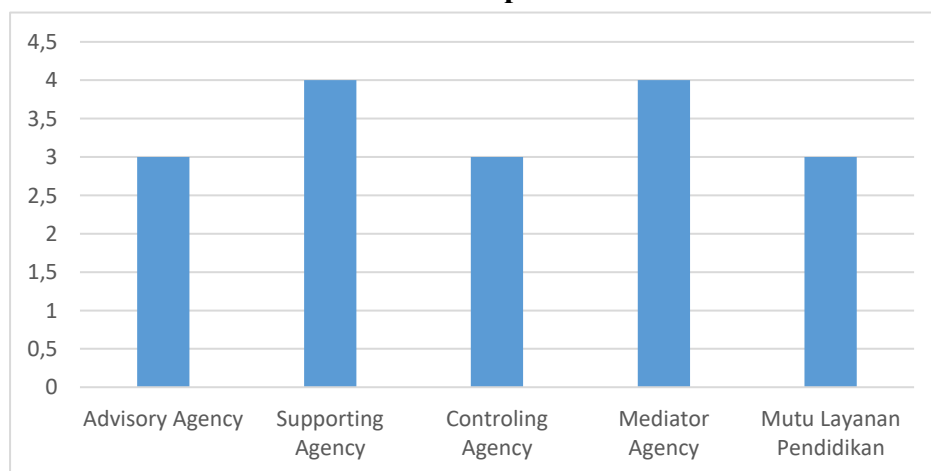
4.1.3 Rekapitulasi Ketercapaian Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Rekapitulasi Ketercapaian Hasil Penelitian

No	Aspek Penelitian	Hasil Triangulasi	Kategori
1	Pemberi Pertimbangan (<i>Advisory Agency</i>)	Komite telah dilibatkan dalam penyusunan program sekolah dan RKAS, namun perannya masih bersifat administratif dan belum optimal dalam perencanaan strategis.	Cukup Baik
2	Badan Pendukung (<i>Supporting Agency</i>)	Komite berperan aktif dalam mendukung pengadaan sarana prasarana sekolah, namun belum memiliki sumber pendanaan eksternal yang berkelanjutan.	Baik
3	Badan Pengontrol (<i>Controlling Agency</i>)	Komite telah melakukan pengawasan terhadap program sekolah dan dana komite, namun pengawasan masih bersifat administratif dan belum sistematis.	Cukup Baik
4	Badan Penghubung (<i>Mediator Agency</i>)	Komite telah menjalankan fungsi sebagai mediator, namun pengelolaan aspirasi masyarakat belum terdokumentasi secara terstruktur.	Baik
5	Mutu Layanan Pendidikan	Mutu layanan pendidikan berada pada kategori cukup baik, namun belum optimal pada seluruh dimensi layanan pendidikan.	Cukup Baik

Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2026).

Gambar 4.1 Grafik Ketercapaian Hasil Penelitian



Keterangan:

1. Skor 4 = Baik
2. Skor 3 = Cukup Baik
3. Skor 2 = Kurang
4. Skor 1 = Sangat Kurang

Berdasarkan hasil triangulasi, aspek *Supporting Agency* dan *Mediator Agency* memperoleh kategori baik, yang menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah menjalankan fungsi pendukung dan penghubung secara efektif. Sementara itu, aspek *Advisory Agency*, *Controlling Agency*, dan Mutu Layanan Pendidikan berada pada kategori cukup baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Komite Sekolah telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan strategis, sistem pengawasan, dan peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diketahui Peran Komite Sekolah dalam meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di sekolah. Adapun peran Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Sekolah Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok:

4.2.2 Komite Sekolah sebagai Pemberi Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan mempunyai tiga peran, yaitu peran dalam perencanaan sekolah, Pelaksanaan program, dan pengadaan sumber daya pendidikan. Dalam perencanaan sekolah Komite Sekolah memberikan pertimbangan mencakup besarnya dana sumbangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan kemampuan orang tua peserta didik; menyeleksi tenaga pendidikan yang ada di masyarakat sebelum direkrut sebagai tenaga pendidikan, tenaga pendidikan yang direkrut harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam peraturan; merencanakan bantuan tenaga masyarakat untuk memperbaiki sarana dan prasarana dengan bantuan masyarakat sarana dan prasarana menjadi terawat sehingga kegiatan belajar mengajar pun berjalan lancar; serta menganalisis rancangan RKAS yang disusun oleh pihak sekolah sehingga apabila terdapat kekurangan dalam RKAS dapat diperbaiki sebelum RKAS disahkan..

Yang kedua dalam hal pelaksanaan program, dengan memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan dan proses pembelajaran kepada para guru. Peran yang ketiga adalah dalam hal pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah serta anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.

Seperti halnya disampaikan oleh salah seorang informan mengatakan peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan misalnya tentang sumber daya pendidikan yang berasal dari komite, dimana setiap siswa dibebankan

yang jumlahnya berdeda antara orang tua yang memiliki jumlah anak yang bersekolah satu atau lebih dari satu.

Pertimbangan yang diberikan komite berbentuk dukungan kepada orang tua siswa, dimana pihak sekolah misalnya ingin menaikkan uang komite sedang kondisi orang tua rata- rata menengah ke bawah, disinilah pihak komite memberikan pertimbangan kepada Kepala Sekolah, sepertinya lebih baik uang komite tidak dinaikkan tapi orang tua siswa lancar atau tepat waktu dalam pembayarannya, dan kalau dinaikkan memang anggaran meningkat namun pembayarannya tidak lancar atau macet. Akhirnya pihak sekolah menerima pertimbangan atau masukan yang diberikan Komite Sekolah.

Setiap dana apapun yang diambil dari orang tua siswa terlebih dahulu koordinasi dan ketua Komite Sekolah sangat menentukan baik ya ataupun tidak. Orang tua siswa dipanggil ke sekolah untuk tatap muka dengan komite, jadi kepala sekolah tidak berdiri sendiri semua harus koordinasi dengan komite sekolah.

Kemudian Komite Sekolah memberikan pertimbangan tentang pengelolaan sumber daya pendidikan, jumlah jam mengajar per minggu, tentang besarnya jumlah honor per jam, sedangkan permintaan guru untuk kepentingan sendiri tidak dilayani, maksudnya komite sekolah mengutamakan kepentingan sekolah lebih dahulu baru kepentingan guru yang lain misalnya mengajar ditempat lain. Komite juga memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah, dimana komite disini harus mengetahui dan menyetujui tenaga honorer yang akan

diperbantukan disekolah apakah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya, hal ini diamini oleh Kepala Sekolah, bahwa pihak sekolah selalu menerima berbagai masukan dan saran dari Ketua Komite Sekolah dan pada umumnya masukan dan saran ataupun pertimbangan yang diberikan komite masih dapat kami terima untuk ditetapkan menjadi suatu kesepakatan atau keputusan sekolah.

Komite Sekolah memberi pertimbangan kepada satuan pendidikan seperti dalam penerimaan siswa baru, dimana ketentuan dari dinas sekolah hanya menampung tiga kelas sementara keinginan masyarakat menyekolahkan anaknya pada sekolah ini melebihi ketentuan dari dinas pendidikan. Akhirnya Komite Sekolah memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah untuk penambahan satu kelas lagi mengingat di sekolah masih memiliki satu kelas yang kosong dan bisa dipergunakan untuk menampung siswa baru satu kelas lagi. Pertimbangan dari pihak komite sekolah tersebut langsung direspon kepala sekolah untuk menambah kelas baru satu kelas menjadi empat kelas.

Sedangkan tentang anggaran pendidikan komite tidak ikut mencampurinya, maupun pengadaan tenaga honorer di sekolah, namun pihak sekolah melalui Pembantu Kepala Sekolah yang membidangnya menyampaikan secara lisan kepada Ketua Komite Sekolah.

Dari beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai dengan peran dan fungsi Komite Sekolah. Dan ini disebabkan pihak satuan

pendidikan dalam hal ini Kepala Sekolah belum sepenuhnya memberikan keleluasaan ataupun kepercayaan penuh kepada Komite Sekolah dalam mengelola anggaran.

Sedangkan peran Komite Sekolah dalam hal pelaksanaan program dan pengelolaan sumber daya pendidikan, pihak sekolah sedikit lebih terbuka memberikan keleluasaan kepada pihak Komite Sekolah. Hal ini membuktikan masih ada ketidak terbukaan kepala sekolah dalam hal pengelolaan anggaran, dan ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pihak pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pendidikan untuk lebih menekankan kepada satuan pendidikan untuk memberikan kebebasan dan keterbukaan dalam segala hal khususnya dalam peningkatan pelayanan pada satuan pendidikan, serta lebih melibatkan lingkungan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Meskipun secara konseptual hasil penelitian ini mendukung teori tentang empat peran utama Komite Sekolah sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 75

Tahun 2016 namun dalam pelaksanaannya di lapangan, ditemukan adanya kesenjangan (gap) antara harapan normatif dengan kenyataan empirik. Sebagai contoh, peran sebagai pemberi pertimbangan seharusnya dijalankan melalui forum resmi dan didasarkan pada dokumen kelembagaan yang sah seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART). Namun, berdasarkan data hasil wawancara dan observasi, sebagian besar Komite Sekolah di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakkok belum memiliki AD/ART, sehingga pengambilan keputusan masih bersifat informal

dan tidak terdokumentasi dengan baik. Demikian pula dalam fungsi sebagai pendukung, komite idealnya dapat menjalin kemitraan dengan dunia usaha atau pihak eksternal lainnya, tetapi dalam kenyataannya masih sangat bergantung pada iuran wali murid. Gap ini menandakan bahwa meskipun struktur dan pemahaman normatif telah dikenal, kapasitas institusional dan budaya partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mendukung implementasi maksimal dari fungsi-fungsi tersebut.

4.2.3 Komite Sekolah sebagai Pendukung (*Supporting agency*)

Komite Sekolah perannya sebagai badan pendukung mempunyai tiga peran yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran. Dalam pengelolaan anggaran memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah, memobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah, memobilisasi tenaga pendidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.

Ihsan (2003:105) menyatakan peranan masyarakat terhadap sekolah antara lain dalam bantuan-bantuan berupa pembiayaan sekolah (gedung, sarana, prasarana) lewat BP3 (sekarang Komite Sekolah) atau secara langsung perorangan/kelompok. Kemudian penyediaan tempat untuk mendirikan sekolah atau lapangan sekolah dan lain-lain keperluan sekolah.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia dan mobilisasi tenaga kependidikan guru dan non guru, pada umumnya Komite Sekolah sangat terlibat dalam memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah, seperti halnya yang disampaikan oleh informan bahwa; beliau selaku ketua Komite

Sekolah terus memantau kondisi ketenagaan pendidikan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan kalau ada kekurangan guru bidang studi di sekolah Komite Sekolah ikut mencari dan melihat kemampuannya dulu baru komite menyampaikan kepada kepala sekolah. Sedangkan untuk mengisi tenaga kependidikan non guru seperti pegawai tata usaha harus diketahui komite, sedangkan untuk pelatih atau pembimbing pramuka, palang merah remaja dan kegiatan tambahan pelajaran diluar jam sekolah serta kegiatan triout yang dilaksanakan lembaga pendidikan lain, itu semua komite sangat dilibatkan.

Sedangkan peran kedua adalah pengelolaan sarana dan prasarana, yang meliputi memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana sekolah. Peran ketiga adalah pengelolaan anggaran memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah, memobilisasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah, mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan dan mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa, dalam pengelolaan sarana dan prasarana, komite sekolah memberikan dukungan bantuan sarana dan prasarana sekolah, seperti yang disampaikan Ketua Komite bahwa komite dengan menggalang bantuan dari masyarakat seperti pengerasan jalan menuju sekolah, menata kebersihan dan kenyamanan di lingkungan sekolah dengan mengadakan penghijauan.

Hal senada apa yang disampaikan oleh Informan tadi diamini oleh pihak sekolah, dimana setiap kegiatan sekolah termasuk pengelolaan anggaran pendidikan Komite Sekolah tetap dikutsertakan atau dilibatkan, sehingga hubungan sekolah dengan masyarakat lingkungannya tetap berjalan lancar. Bahkan kemajuan sekolah terus meningkat, dimana sekolah ini sudah mendapatkan akreditasi A, hal ini yang sangat membanggakan saya selaku Kepala Sekolah. Dan ini semua didapatkan karena adanya kepedulian masyarakat melalui Komite Sekolah terhadap kemajuan pendidikan di sekolah ini.

Begitu juga disampaikan oleh salah seorang informan, tentang kondisi ketenagaan di sekolah sudah mencukupi, sedangkan pengelolaan sarana dan prasarana komite sekolah terus memberikan dukungan terhadap kebutuhan sekolah dengan mengadakan perbaikan dan penambahan meja, kursi dan perbaikan pagar sekolah, dimana dananya diambil dari masyarakat yang peduli pendidikan, seperti yang dilakukan ketua Komite Sekolah yang sangat peduli terhadap pendidikan.

Peran Komite Sekolah dalam pengelolaan anggaran pada setiap sekolah, sesuai dengan hasil wawancara dengan informan di lapangan menunjukkan bahwa dalam penggalangan dana dari masyarakat dan dunia usaha dan dunia industri belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ini dibuktikan dengan semua Komite Sekolah yang di teliti belum ada satupun komite yang melakukannya, artinya komite sekolah hanya memanfaatkan sumber dana dari iuran komite yang dikutip dari orang tua siswa.

Seperti yang disampaikan oleh informan, dalam hal dukungan dana sekolah, komite sekolah sampai saat ini pernah menerima dana dari komite yang diambil dari orang tua siswa, untuk pembangunan sekolah seperti pemagaran atau pembangunan WC siswa.

Begitu juga halnya di SD Negeri 4 Cintaratu Kecamatan Lakbok seperti yang disampaikan salah seorang informan dalam penelitian ini bahwa penggalangan dana sekolah untuk pemagaran sekolah berasal dari komite yang diambil dari orang tua siswa saja sebesar Rp. 50.000,- untuk tiap siswa, di luar dana tersebut tidak ada.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Andriani (2019), yang menyatakan bahwa peran Komite Sekolah masih belum optimal, terutama dalam aspek pengawasan dan pengambilan keputusan anggaran. Namun, hasil penelitian ini memberikan nuansa baru dengan memperlihatkan variasi praktik di antara sekolah-sekolah dalam satu gugus. Sebagai contoh, di SD Negeri 1 Cintaratu, kepala sekolah secara aktif melibatkan komite dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), termasuk memberi ruang bagi komite untuk menganalisis usulan kegiatan sebelum disahkan. Sebaliknya, di beberapa sekolah lain, keterlibatan komite masih bersifat formalitas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas peran komite sangat bergantung pada karakteristik kepemimpinan kepala sekolah, pola komunikasi antara sekolah dan masyarakat, serta tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan. Hal ini menambah dimensi penting bagi studi tentang manajemen berbasis sekolah (*school-based*

management) yang selama ini cenderung menggeneralisasi peran komite tanpa mempertimbangkan dinamika lokal di masing-masing satuan pendidikan.

4.2.4 Komite Sekolah sebagai Pengontrol (*Controlling Agency*)

Komite Sekolah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga peran, pertama berperan sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di sekolah, dengan mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kualitas kebijakan/kualitas program dan proses perencanaan pendidikan di sekolah.

Peran kedua memantau pelaksanaan program sekolah, dengan organisasi sekolah, memantau penjadwalan program sekolah, memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah memantau sumber daya pelaksana program dan memantau partisipasi *stake holder* pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.

Komite Sekolah dalam pengawasan terhadap sumber daya pelaksana program sekolah, hanya berbentuk saran kepada kepala sekolah, sedangkan dalam pengawasan terhadap proses belajar mengajar komite sekolah tidak pernah. Kemudian dalam memberikan saran tentang proses belajar mengajar seperti menyarankan guru lebih melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran di kelas atau menyarankan untuk memperbanyak tugas di rumah, Komite Sekolah juga tidak pernah karena menurut beliau itu sudah terlalu maju dan bukan wewenang komite.

Peran yang ketiga adalah memantau *out put* pendidikan, badan pengontrol memantau hasil ujian akhir, memantau angka partisipasi sekolah,

memantau angka mengulang sekolah, memantau angka bertahan sekolah. Dalam hal perencanaan, mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah, mengontrol kebijakan di sekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan, pengawasan terhadap kualitas program sekolah.

Menurut Ihsan (2023) peranan masyarakat terhadap sekolah antara lain terutama dalam Pengawasan, masyarakat terlibat juga dalam pengawasan terhadap sekolah (*sosial control*). Pengawasan ini terhadap segala gerak-gerik sekolah selaku lembaga pendidikan, pengawasan dapat secara langsung atau lewat Komite Sekolah atau lewat media massa. Dengan demikian kegiatan pengawasan merupakan kontrol terhadap kerja organisasi, baik menyangkut tugas perorangan maupun institusi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran Komite Sekolah sebagai pengontrol (*controlling agency*) belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana diharapkan dalam teori. Secara konseptual, komite memiliki kewenangan moral untuk memantau dan mengevaluasi jalannya program pendidikan, penggunaan anggaran, proses pembelajaran, serta keterlibatan seluruh stakeholder pendidikan di lingkungan sekolah. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2002 yang menyebutkan bahwa komite berperan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas manajemen pendidikan. Akan tetapi, di lapangan masih ditemukan bahwa keterlibatan komite dalam fungsi pengawasan bersifat terbatas dan belum menyeluruh.

Dari data wawancara, terungkap bahwa komite memang memantau sebagian aspek seperti laporan keuangan dari iuran wali murid dan pelaksanaan program sekolah yang melibatkan dana komite, tetapi belum banyak terlibat dalam pemantauan dana BOS maupun aspek pedagogis di dalam kelas. Komite juga tidak memiliki akses atau kewenangan untuk masuk langsung ke ruang kelas guna memantau proses belajar mengajar. Informasi mengenai mutu pembelajaran biasanya hanya diperoleh dari laporan kepala sekolah atau keluhan orang tua siswa. Walaupun demikian, ketika terjadi penurunan hasil belajar, komite tetap mengambil inisiatif untuk memberikan masukan, seperti mendorong tambahan jam pelajaran atau menyarankan perbaikan strategi pembelajaran. Sayangnya, saran tersebut tidak selalu disertai dengan instrumen pengawasan yang terstruktur atau berbasis data.

Selain itu, pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sekolah juga masih bersifat administratif. Komite lebih sering hanya menandatangani SPJ atau meminta laporan dari pihak sekolah setelah kegiatan selesai. Mereka tidak melakukan pengawasan teknis karena memang tidak memiliki latar belakang dalam bidang konstruksi, sebagaimana dikatakan oleh informan dalam wawancara. Peran mereka lebih kepada pemantau sosial untuk memastikan pelaksanaan proyek tidak menyimpang dari tujuan awal. Bahkan dalam beberapa kasus, komite hanya menerima laporan yang sudah jadi, tanpa keterlibatan dalam tahap perencanaan teknis atau pelaksanaan proyek.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu seperti studi oleh Nurfadilah (2020) menunjukkan kesamaan bahwa komite di tingkat SD lebih sering

difungsikan secara administratif daripada fungsional. Penelitian itu menyimpulkan bahwa lemahnya keterlibatan komite dalam fungsi pengawasan disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan tugas dan haknya, serta tidak adanya pelatihan yang sistematis dari pemerintah daerah. Temuan dalam penelitian ini menguatkan kesimpulan tersebut, tetapi juga menambahkan dimensi baru: bahwa bahkan di sekolah yang sudah memiliki komite aktif, peran pengawasan tetap terbatas apabila kepala sekolah tidak membuka ruang partisipasi secara transparan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Komite Sekolah sebagai pengontrol dalam peningkatan mutu layanan pendidikan berada pada posisi yang belum optimal. Komite lebih dominan menjalankan pengawasan administratif dan sosial, belum sampai pada level evaluatif yang berbasis indikator kinerja mutu pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas melalui pelatihan, regulasi yang lebih spesifik di tingkat daerah, serta budaya kolaboratif dari kepala sekolah agar fungsi pengawasan komite dapat berjalan lebih efektif dan bermakna.

4.2.5 Komite Sekolah sebagai Penghubung (*Mediator agency*)

Komite Sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga peran yaitu sebagai penghubung dalam Perencanaan, yaitu menjadi penghubung antara Komite Sekolah dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah dan Komite Sekolah dengan Dewan Pendidikan, kemudian mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan, membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepada sekolah. Dalam hal penghubung dalam

perencanaan sekolah, dari pengamatan di lapangan menunjukkan komite sekolah telah melaksanakan perannya artinya setiap keputusan yang dihasilkan dalam rapat itu adalah aspirasi atau keinginan yang muncul dari masyarakat. kemudian komite sekolah apa yang dihasilkan dalam rapat tersebut disampaikan kepada sekolah untuk ditindaklanjuti dan seterusnya akan dilaksanakan, begitu juga dengan dewan pendidikan, komite sekolah terus melaksanakan hubungan yang baik meskipun sampai saat ini banyak yang diperbuat oleh Dewan Pendidikan untuk pemberdayaan Komite Sekolah di Kecamatan Lakbok.

Sedangkan sebagai peran kedua adalah pelaksanaan program, dengan mensosialisasikan kebijakan program sekolah kepada masyarakat, menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah serta mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat (orang tua siswa) kepada sekolah. Dalam pelaksanaan program, apa yang dihasilkan dalam musyawarah setelah disetujui pihak sekolah, komite sekolah kembali menyampaikan kepada orang tua siswa melalui surat kepada anak didik. Dan semua keluhan yang disampaikan orang tua siswa tetap ditampung komite sekolah yang selanjutnya akan disampaikan kepada kepala sekolah.

Peran yang ketiga sebagai penghubung adalah pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan mengidentifikasi kondisi sumber daya sekolah dan sumber daya masyarakat, memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di sekolah dan mengkoordinasikan bantuan masyarakat.

Dalam hal penghubung dalam pengelolaan sumber daya pendidikan, pihak Komite Sekolah masih kurang berperan, belum sampai kepada penggalangan dana dari masyarakat seperti dunia usaha dan dunia industri ataupun masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat optimalisasi peran Komite Sekolah dapat dikategorikan menjadi faktor struktural, kultural, dan sumber daya manusia. Dari aspek struktural, belum adanya Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Ciamis yang secara eksplisit mengatur dan memperkuat kedudukan hukum Komite Sekolah menyebabkan kelembagaan komite berjalan tanpa dukungan regulasi daerah yang memadai. Dari aspek kultural, masih ada anggapan di masyarakat bahwa urusan pendidikan adalah tanggung jawab sekolah semata, sehingga partisipasi dalam komite cenderung rendah dan bersifat pasif. Dari sisi sumber daya manusia, tidak semua anggota komite memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman organisasi yang memadai, sehingga kemampuan mereka dalam memahami peran strategis komite sering kali terbatas pada kegiatan administratif saja. Selain itu, belum adanya pelatihan khusus yang diberikan oleh Dinas Pendidikan atau pihak terkait juga memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, banyak komite sekolah hanya menjalankan peran simbolis tanpa dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan.

Optimalisasi Peran Kerja Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Optimalisasi peran kerja Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan pada pendidikan dasar merupakan suatu proses strategis yang tidak hanya menuntut keterlibatan formal, tetapi juga kualitas partisipasi, kapasitas kelembagaan, serta keberlanjutan program yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Komite Sekolah di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok telah menjalankan perannya sebagai *advisory, supporting, controlling*, dan *mediator*, namun implementasinya masih belum optimal secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peran normatif yang diatur dalam kebijakan dengan praktik empirik di lapangan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat bahwa efektivitas organisasi partisipatif dalam pendidikan sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia, sistem kerja, dan dukungan kebijakan (Permendikbud No. 75 Tahun 2016; Mulyasa, 2023).

Untuk memperkuat analisis mengenai mutu layanan pendidikan, penelitian ini juga mengkaji persepsi orang tua siswa sebagai pengguna langsung layanan pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua siswa, yaitu Bu Yutini (Kamis, 2 April 2026), diperoleh gambaran bahwa mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek.

1. Optimalisasi Peran Komite Sekolah pada Aspek *Tangibles* (Bukti Fisik)

Pada dimensi *tangibles*, peran Komite Sekolah telah terlihat melalui keterlibatan dalam pengadaan dan perbaikan sarana prasarana seperti pembangunan pagar sekolah, perbaikan WC, serta penyediaan fasilitas pendukung pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah berfungsi sebagai *Supporting agency* yang mampu memobilisasi sumber daya masyarakat untuk mendukung layanan pendidikan. Namun demikian, optimalisasi belum sepenuhnya tercapai karena masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan bergantung pada iuran orang tua siswa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran komite belum berkembang ke arah penguatan jejaring eksternal, seperti kerja sama dengan dunia usaha atau lembaga lain yang berpotensi meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan secara berkelanjutan. Padahal, dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga strategis dalam memperluas sumber daya pendidikan (Slameto, 2015). Oleh karena itu, optimalisasi pada aspek *tangibles* memerlukan perencanaan berbasis kebutuhan jangka panjang serta penguatan kemitraan eksternal agar fasilitas pendidikan benar-benar mampu menunjang mutu layanan secara optimal. Namun demikian, optimalisasi belum sepenuhnya tercapai karena masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan bergantung pada iuran orang tua siswa.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang menunjukkan bahwa komite sekolah tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk dana, tetapi juga membantu mengidentifikasi kebutuhan fasilitas sekolah berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Komite dilibatkan dalam perencanaan kebutuhan sarana melalui rapat bersama sekolah dan memberikan pertimbangan terkait prioritas pengadaan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa, mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok secara umum dinilai sudah cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penilaian tersebut terlihat pada lima dimensi mutu layanan pendidikan, yaitu *tangibles*. Perspektif orang tua sebagai pengguna layanan pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan sekolah terhadap peserta didik.

Pada dimensi *tangibles* atau bukti fisik, orang tua siswa menilai bahwa kondisi sarana dan prasarana sekolah sudah cukup memadai dan mendukung proses pembelajaran, meskipun masih memerlukan pengembangan fasilitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yutini selaku orang tua siswa pada hari Kamis, 2 April 2026, mengungkapkan bahwa:

“Sarana dan prasarana di sekolah menurut saya sudah cukup, seperti ruang kelas dan fasilitas dasar sudah ada, tapi masih perlu diperbaiki dan ditambah supaya lebih nyaman.” (Y.OTS2)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan Desi selaku orang tua siswa pada hari Selasa, 7 April 2026, yang menyatakan:

“Sudah lumayan bagus dan bersih, gedung juga kokoh. Cuma kalau bisa catnya diperbarui lagi biar lebih seger kelihatannya.” (D.OTS1)

Selain itu, fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan dan alat pembelajaran dinilai cukup membantu proses belajar siswa, namun masyarakat masih mengharapkan adanya penambahan fasilitas penunjang pembelajaran modern. Informan Desi juga mengungkapkan bahwa:

“Kalau bisa perpustakaannya ditambah buku cerita baru, sama pengennya ada komputer biar anak-anak belajar ngetik.” (D.OTS1)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah menyediakan fasilitas dasar pendidikan dengan cukup baik, namun peningkatan kualitas sarana prasarana masih diperlukan agar lingkungan belajar menjadi lebih nyaman, menarik, dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini, Komite Sekolah juga dinilai telah berperan dalam mendukung pengadaan fasilitas sekolah melalui kegiatan gotong royong dan perbaikan fasilitas yang rusak.

Dari perspektif orang tua, kondisi sarana dan prasarana sekolah dinilai sudah cukup memadai, seperti ruang kelas dan fasilitas dasar yang tersedia, namun masih memerlukan perbaikan dan penambahan agar lebih nyaman dan mendukung semangat belajar siswa. Lingkungan sekolah juga dinilai cukup bersih, tetapi masih perlu penataan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa mutu layanan pada aspek *tangibles* telah terpenuhi

secara dasar, namun belum optimal dalam memberikan kenyamanan belajar yang maksimal.

Namun demikian, optimalisasi belum sepenuhnya tercapai karena masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan bergantung pada iuran orang tua siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran komite belum berkembang ke arah penguatan jejaring eksternal, seperti kerja sama dengan dunia usaha atau lembaga lain yang berpotensi meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan secara berkelanjutan.

2. Optimalisasi Peran Komite Sekolah pada Aspek *Reliability* (Keandalan)

Dalam aspek *reliability*, Komite Sekolah telah terlibat dalam penyusunan dan evaluasi program sekolah, termasuk memberikan pertimbangan dalam RKAS serta memantau pelaksanaan program pendidikan. Hal ini menunjukkan adanya peran sebagai advisory dan *controlling agency* dalam menjaga konsistensi layanan pendidikan. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal karena belum didukung oleh sistem kerja yang terstruktur, seperti tidak adanya jadwal rapat rutin, belum tersusunnya AD/ART, serta minimnya dokumentasi evaluasi program.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa komite sekolah selalu dilibatkan dalam penyusunan program kerja tahunan melalui rapat bersama antara kepala sekolah, guru, dan komite. Dalam forum tersebut, komite menyampaikan aspirasi orang tua sehingga program sekolah lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, komite juga dilibatkan

dalam pengesahan RAPBS sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Keadaan ini berdampak pada belum terjaminnya konsistensi mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan. Menurut teori kualitas layanan, keandalan merupakan kemampuan organisasi dalam memberikan layanan secara konsisten dan dapat dipercaya (Parasuraman et al., 2018). Oleh karena itu, tanpa sistem yang terorganisir, peran komite cenderung bersifat insidental dan tidak berkelanjutan. Optimalisasi pada aspek ini memerlukan penguatan kelembagaan, penyusunan program kerja yang sistematis, serta peningkatan kapasitas manajerial komite sekolah agar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi secara profesional.

Pada dimensi *reliability* atau keandalan layanan, orang tua siswa menilai bahwa kualitas pembelajaran dan pelayanan sekolah sudah berjalan secara cukup konsisten. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yutini pada hari Kamis, 2 April 2026, menyampaikan bahwa:

“Untuk kualitas pembelajaran yang diterima anak saya sudah cukup baik, anak juga bisa mengikuti pelajaran, tapi masih bisa ditingkatkan lagi.” (Y.OTS2)

Sementara itu, Informan Desi pada hari Selasa, 7 April 2026, menyatakan:

“Jadwal belajarnya tertib. Guru-guru juga rajin masuk, jarang ada kelas kosong.” (D.OTS1)

Pelayanan administrasi sekolah juga dinilai cukup baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Orang tua siswa merasakan bahwa pelayanan sekolah berjalan dengan ramah dan tidak berbelit-belit. Hal ini

menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki sistem pelayanan pendidikan yang cukup baik dalam mendukung proses belajar mengajar maupun kebutuhan administrasi masyarakat.

Dari sisi orang tua, kualitas pembelajaran dinilai sudah cukup baik dan kegiatan belajar mengajar berjalan cukup teratur, meskipun masih terdapat kendala kecil. Pelayanan administrasi juga dinilai cukup baik, namun masih perlu peningkatan dalam kecepatan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan telah berjalan secara konsisten, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi harapan pengguna layanan.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut belum berjalan optimal karena belum didukung oleh sistem kerja yang terstruktur, seperti belum adanya jadwal rapat rutin dan dokumentasi evaluasi program yang sistematis. Hal ini berdampak pada belum terjaminnya konsistensi mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan.

3. Optimalisasi Peran Komite Sekolah pada Aspek *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Pada aspek *responsiveness*, Komite Sekolah telah menunjukkan peran yang cukup baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik melalui forum formal maupun pendekatan informal seperti komunikasi langsung dan media digital (*WhatsApp*). Temuan ini menunjukkan bahwa komite telah menjalankan fungsi mediator secara aktif dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dan Masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komite sekolah aktif menjadi penghubung antara orang tua dan sekolah. Keluhan atau masukan dari masyarakat terkait pembelajaran maupun kegiatan sekolah disampaikan kepada pihak sekolah melalui forum rapat atau komunikasi langsung. Bahkan, komite juga berperan dalam menyampaikan aspirasi terkait metode pembelajaran, seperti perlunya guru lebih aktif melibatkan siswa atau penyesuaian beban tugas.

Pada dimensi *responsiveness* atau daya tanggap, sekolah dan Komite Sekolah dinilai cukup responsif terhadap kebutuhan dan keluhan orang tua siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yutini pada hari Kamis, 2 April 2026, menyampaikan bahwa:

“Untuk respon sekolah terhadap keluhan orang tua sudah cukup baik, biasanya ditanggapi, tapi semoga bisa lebih cepat lagi.” (Y.OTS2)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Informan Desi pada hari Selasa, 7 April 2026:

“Kalau kita tanya sesuatu lewat WA atau datang langsung, guru-guru mau dengerin dan kasih jawaban.” (D.OTS1)

Selain itu, Komite Sekolah juga dianggap telah membantu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pihak sekolah. Informan Desi menyatakan:

“Komite ngebantu banget nyampein unek-unek kami ke Kepala Sekolah biar kami nggak sungkan.” (D.OTS1)

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi antara sekolah, komite, dan masyarakat telah berjalan cukup baik. Penggunaan media

komunikasi seperti grup WhatsApp juga dinilai membantu mempercepat penyampaian informasi dan penanganan masalah siswa.

Dari perspektif orang tua, sekolah dinilai sudah merespon keluhan dengan cukup baik, dan setiap keluhan yang disampaikan umumnya mendapatkan tanggapan. Namun demikian, kecepatan respon masih perlu ditingkatkan agar lebih sigap dalam menangani permasalahan siswa maupun kebutuhan orang tua. Selain itu, peran komite sekolah dalam menyampaikan aspirasi juga sudah dirasakan, meskipun diharapkan lebih aktif lagi.

Namun demikian, optimalisasi daya tanggap masih menghadapi kendala karena belum adanya sistem pengelolaan aspirasi yang terstruktur. Aspirasi masyarakat cenderung belum terdokumentasi secara sistematis dan tindak lanjutnya belum terukur secara jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam pelayanan pendidikan, karena respons yang diberikan tidak selalu berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Menurut Tjiptono (2012), daya tanggap dalam layanan pendidikan sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan dalam merespon kebutuhan pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen aspirasi yang terorganisir agar peran komite dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

4. Optimalisasi Peran Komite Sekolah pada Aspek *Assurance* (Jaminan)

Dalam dimensi *assurance*, Komite Sekolah berperan dalam memberikan jaminan mutu layanan pendidikan melalui dukungan terhadap

peningkatan kualitas pembelajaran, seperti usulan program tambahan (les) serta pemantauan hasil belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa komite memiliki kepedulian terhadap kualitas output pendidikan, khususnya prestasi akademik siswa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komite sekolah juga memberikan pertimbangan dalam perekrutan tenaga honorer serta pemberian insentif bagi guru, terutama dalam kondisi kekurangan tenaga pengajar. Komite menyarankan agar perekrutan tenaga dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan sekolah, serta mempertimbangkan kondisi keuangan sekolah.

Pada dimensi *assurance* atau jaminan mutu layanan, orang tua siswa menilai bahwa guru memiliki kemampuan mengajar yang cukup baik serta mampu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yutini pada hari Kamis, 2 April 2026, mengungkapkan bahwa:

“Guru-guru sudah cukup baik dalam mengajar, anak juga bisa memahami pelajaran, tapi tetap perlu peningkatan lagi.” (Y.OTS2)

Sedangkan Informan Desi pada hari Selasa, 7 April 2026, menyatakan:

“Guru-gurunya sabar-sabar dan pinter ngemong anak desa. Cara ngajarnya juga gampang dimengerti anak.” (D.OTS1)

Selain itu, keamanan lingkungan sekolah juga dinilai cukup baik.

Orang tua merasa tenang karena sekolah memiliki lingkungan yang aman dan guru menunjukkan sikap yang ramah terhadap siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah telah mampu memberikan jaminan

kenyamanan dan keamanan belajar bagi peserta didik, meskipun peningkatan kualitas pembelajaran masih tetap diperlukan.

Dari sisi orang tua, kemampuan guru dalam mengajar dinilai sudah cukup baik dan siswa dapat memahami pelajaran dengan baik. Lingkungan sekolah juga dinilai cukup aman dan nyaman, meskipun pengawasan masih perlu ditingkatkan. Sikap guru terhadap siswa dinilai baik dan ramah, namun diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan setiap siswa secara individual.

Namun demikian, keterlibatan komite dalam peningkatan kompetensi guru masih terbatas dan belum bersifat sistematis. Padahal, kualitas layanan pendidikan sangat ditentukan oleh kompetensi tenaga pendidik sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru merupakan faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, optimalisasi peran komite pada aspek *assurance* perlu diarahkan pada dukungan terhadap program pengembangan profesional guru, baik melalui pelatihan, workshop, maupun kolaborasi dengan pihak eksternal.

5. Optimalisasi Peran Komite Sekolah pada Aspek *Empathy* (Empati)

Pada aspek *empathy*, Komite Sekolah menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam memperhatikan kebutuhan siswa, terutama siswa yang kurang mampu. Komite terlibat dalam pemberian bantuan, keringanan biaya, serta membantu mencari solusi bagi siswa yang berpotensi putus

sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa komite tidak hanya berperan dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek sosial dan kemanusiaan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara, komite sekolah membantu meringankan beban orang tua melalui kebijakan seperti pembayaran buku secara cicilan serta mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga dalam penentuan iuran. Selain itu, komite juga aktif dalam membantu mencari solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan, baik dalam aspek ekonomi maupun pembelajaran.

Pada dimensi *empathy* atau empati, perhatian sekolah terhadap kebutuhan siswa dinilai cukup baik, terutama dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan siswa kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Yutini pada hari Kamis, 2 April 2026, menyampaikan bahwa:

“Guru sudah membantu siswa yang kesulitan belajar, tapi semoga bisa lebih sering diperhatikan lagi.” (Y.OTS2)

Sementara itu, Informan Desi pada hari Selasa, 7 April 2026, menyatakan:

“Guru-gurunya hapal nama anak saya dan tahu sifat-sifatnya, jadi kerasa akrab.” (D.OTS1)

Komunikasi antara sekolah dan orang tua juga dinilai cukup baik melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung. Selain itu, bantuan bagi siswa kurang mampu seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah

dan Komite Sekolah telah memiliki kepedulian sosial terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat.

Dari perspektif orang tua, perhatian sekolah terhadap siswa sudah cukup baik, terutama dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Namun, perhatian tersebut diharapkan lebih merata kepada seluruh siswa. Komunikasi antara sekolah dan orang tua juga dinilai cukup baik, meskipun perlu ditingkatkan frekuensinya. Selain itu, bantuan bagi siswa kurang mampu sudah tersedia, namun masih terbatas dan diharapkan dapat ditingkatkan.

Namun demikian, program bantuan tersebut belum terstruktur secara sistematis dan masih bersifat situasional. Belum adanya database siswa yang membutuhkan bantuan serta belum adanya program berkelanjutan menjadi kendala dalam optimalisasi peran ini. Menurut konsep pelayanan pendidikan yang berorientasi pada pelanggan, empati merupakan kemampuan lembaga dalam memahami kebutuhan individu peserta didik secara personal (Kotler & Keller, 2016). Oleh karena itu, diperlukan sistem pendataan yang komprehensif serta program bantuan yang berkelanjutan agar layanan pendidikan dapat lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakbok berada pada kategori cukup baik pada seluruh dimensi layanan pendidikan. Sekolah dan Komite Sekolah telah menunjukkan upaya dalam meningkatkan kualitas

layanan pendidikan melalui penyediaan fasilitas, peningkatan kualitas pembelajaran, pelayanan yang responsif, serta perhatian terhadap kebutuhan siswa. Namun demikian, optimalisasi mutu layanan pendidikan masih memerlukan peningkatan fasilitas pembelajaran, penguatan komunikasi dengan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan peran Komite Sekolah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

Namun demikian, peran komite sekolah telah menunjukkan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu layanan pendidikan, khususnya dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dan orang tua, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran, sarana prasarana, dan kebutuhan tenaga pendidik. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa komite berperan aktif dalam membantu sekolah mengatasi keterbatasan sumber daya melalui dukungan masyarakat serta memberikan solusi yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi orang tua siswa.

Dengan demikian, optimalisasi peran Komite Sekolah perlu diarahkan pada penguatan peran yang telah berjalan melalui peningkatan kapasitas komite dalam perencanaan dan pengawasan, penyusunan program kerja yang lebih terstruktur, serta pengembangan kerja sama dengan pihak luar. Selain itu, diperlukan sistem pengelolaan aspirasi masyarakat yang lebih terorganisir agar setiap masukan dapat ditindaklanjuti secara efektif. Upaya tersebut sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis Sekolah yang menekankan pentingnya

partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Mulyasa, 2013).

4.3 Triangulasi

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas dan keabsahan data penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data sehingga diperoleh data yang lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam mengkaji optimalisasi peran kerja Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SD Negeri Gugus 3 Kecamatan Lakhok Kabupaten Ciamis.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara antara guru, Komite Sekolah, dan orang tua siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD Negeri 1 dan SD Negeri 4 Cintaratu, diperoleh informasi bahwa Komite Sekolah telah dilibatkan dalam penyusunan program sekolah, RKAS, pengadaan sarana prasarana, serta penyampaian aspirasi orang tua siswa. Informasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan orang tua siswa yang menyatakan bahwa Komite Sekolah sudah membantu menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat, terutama dalam penyampaian keluhan dan kebutuhan siswa. Sementara itu, keterlibatan Komite Sekolah dalam pengelolaan pendidikan sudah berjalan, namun masih cenderung bersifat

administratif dan belum optimal dalam aspek pengawasan serta pengembangan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh.

Pada aspek *advisory agency*, hasil triangulasi menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah terlibat dalam penyusunan program sekolah dan pemberian pertimbangan terhadap kebutuhan pendidikan. Guru menyatakan bahwa komite dilibatkan dalam rapat penyusunan RKAS dan memberikan masukan terkait pengadaan buku, sarana prasarana, serta kebijakan sekolah yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Secara administratif keterlibatan komite sudah berjalan sesuai ketentuan, namun belum berbasis perencanaan strategis jangka panjang. Dengan demikian, hasil triangulasi menunjukkan bahwa fungsi pemberi pertimbangan telah berjalan, tetapi belum optimal dalam mendukung pengembangan mutu layanan pendidikan secara komprehensif.

Pada aspek *supporting agency*, triangulasi data menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah memberikan dukungan dalam pengadaan sarana prasarana seperti pembangunan pagar sekolah, fasilitas cuci tangan, dan perbaikan ruang kelas. Orang tua siswa juga menyampaikan bahwa mereka dilibatkan dalam mendukung fasilitas sekolah melalui rapat dan kegiatan tertentu. Akan tetapi, hasil wawancara dengan guru dan pengawas menunjukkan bahwa dukungan tersebut masih bergantung pada iuran orang tua dan belum berkembang pada kerja sama dengan pihak eksternal. Dengan demikian, hasil triangulasi menunjukkan bahwa peran Komite Sekolah sebagai badan

pendukung sudah berjalan, namun belum optimal dalam pengembangan sumber daya pendidikan yang berkelanjutan.

Pada aspek *controlling agency*, hasil triangulasi menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana komite dan pelaksanaan program sekolah melalui laporan pertanggungjawaban serta rapat evaluasi. Guru menyampaikan bahwa komite ikut memantau hasil belajar siswa dan memberikan saran terhadap kegiatan sekolah. Namun, fungsi pengawasan masih terbatas karena komite tidak terlibat dalam pengawasan dana BOS maupun proses pembelajaran di kelas. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengontrol telah berjalan, tetapi masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu menjamin mutu layanan pendidikan secara optimal.

Pada aspek *mediator agency*, triangulasi data menunjukkan bahwa Komite Sekolah telah menjalankan fungsi sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat. Orang tua siswa menyatakan bahwa komite membantu menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui rapat maupun komunikasi informal seperti grup WhatsApp. Guru juga menyampaikan bahwa komite sering membantu menjelaskan program sekolah kepada masyarakat dan menjadi penghubung dalam penyelesaian masalah siswa. Meskipun demikian, pengelolaan aspirasi masyarakat belum dilakukan secara sistematis dan belum memiliki mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Oleh karena itu, hasil triangulasi menunjukkan bahwa fungsi mediator telah berjalan cukup baik,

namun masih perlu penguatan dalam aspek pengelolaan komunikasi dan dokumentasi aspirasi masyarakat.

Selain triangulasi sumber, penelitian ini juga menggunakan triangulasi teknik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara diperkuat melalui observasi terhadap kondisi sarana prasarana sekolah, aktivitas komunikasi antara sekolah dan orang tua, serta keterlibatan Komite Sekolah dalam kegiatan pendidikan. Dokumentasi seperti RKAS, notulen rapat, program kerja sekolah, dan dokumentasi kegiatan digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi. Melalui triangulasi teknik tersebut, data penelitian dinilai memiliki tingkat keabsahan yang tinggi karena diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data yang saling mendukung. Hasil triangulasi juga ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Triangulasi Penelitian

No	Pertanyaan	Informan	Non Informan/Pengawas	Hasil Triangulasi
1	Apakah Komite Sekolah dilibatkan dalam penyusunan program sekolah dan RKAS?	Guru menyatakan bahwa Komite Sekolah terlibat dalam rapat penyusunan program sekolah dan RKAS.	Pengawas menyatakan bahwa keterlibatan komite sudah sesuai prosedur, namun masih bersifat administratif.	Data menunjukkan adanya kesesuaian bahwa Komite Sekolah telah dilibatkan dalam penyusunan program sekolah, tetapi perannya belum optimal dalam perencanaan strategis.
2	Bagaimana peran Komite	Komite membantu	Pengawas menyatakan bahwa dukungan	Sesuai dengan data

No	Pertanyaan	Informan	Non Informan/Pengawas	Hasil Triangulasi
	Sekolah dalam pengadaan sarana dan prasarana?	pengadaan pagar, fasilitas cuci tangan, dan perbaikan ruang kelas melalui iuran orang tua.	sarana sudah berjalan, tetapi masih bergantung pada kontribusi masyarakat.	penelitian, Komite Sekolah berperan aktif dalam mendukung sarana prasarana sekolah, namun belum memiliki sumber pendanaan eksternal yang berkelanjutan.
3	Apakah Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap program dan anggaran sekolah?	Guru menyatakan bahwa komite memantau penggunaan dana komite dan hasil belajar siswa.	Pengawas menyatakan bahwa pengawasan komite masih terbatas dan belum menyentuh seluruh aspek pengelolaan sekolah.	Fungsi pengawasan telah sesuai dan berjalan, namun masih bersifat administratif dan belum sistematis.
4	Bagaimana peran Komite Sekolah dalam menjembatani komunikasi sekolah dan orang tua?	Orang tua menyatakan bahwa komite membantu menyampaikan aspirasi dan keluhan melalui rapat dan grup WhatsApp.	Pengawas menyatakan bahwa komunikasi antara sekolah dan masyarakat sudah cukup baik.	Komite telah sesuai dan menjalankan fungsi mediator, tetapi pengelolaan aspirasi belum terdokumentasi secara terstruktur.
5	Bagaimana mutu layanan pendidikan di sekolah?	Orang tua menilai mutu layanan pendidikan sudah cukup	Pengawas menyatakan bahwa sekolah telah berupaya meningkatkan mutu layanan pendidikan secara bertahap.	Mutu layanan pendidikan berada pada kategori cukup baik, namun belum optimal

No	Pertanyaan	Informan	Non Informan/Pengawas	Hasil Triangulasi
		baik, namun masih perlu peningkatan pada fasilitas dan pelayanan.		pada seluruh dimensi layanan pendidikan.